

.....  
**EVALUASI PROGRAM BEKERJA (BEDAH KEMISKINAN RAKYAT SEJAHTERA)  
DI KECAMATAN CIKEMBAR KABUPATEN SUKABUMI  
TAHUN 2019**

Oleh

Audi Muhamad Karyadara<sup>1</sup>, Ike Rachmawati<sup>2</sup>, Tuah Nur<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Dan Humaniora

Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Email: [1Audymuhamad236@Yahoo.Com](mailto:Audymuhamad236@Yahoo.Com)

**Abstrak**

Penelitian ini berjudul evaluasi program bekerja (bedah kemiskinan rakyat sejahtera) di kecamatan cikembar kabupaten sukabumi. penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana evaluasi program bekerja (bedah kemiskinan rakyat sejahtera) dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan program bekerja (bedah kemiskinan rakyat sejahtera) di kecamatan cikembar kabupaten sukabumi. metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. studi ini menggunakan enam evaluasi kebijakan indikator dari dunn (2003). penelitian ini dilakukan di dinas peternakan kabupaten sukabumi. hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program bekerja (bedah kemiskinan rakyat sejahtera) belum berjalan optimal. simpulannya bisa dilihat dari kegiatan sosialisasi belum sepenuhnya menyentuh rtm, pendataan masih menggunakan data lama. faktor penghambatnya adalah jumlah pendamping tidak sebanding dengan jumlah rtm, jumlah pakan yang diberikan tidak mencukupi sampai ke masa panen. faktor pendukungnya adalah adanya pedoman pelaksanaan program bekerja.

**Kata Kunci: Evaluasi, Kebijakan, Program Bekerja**

**PENDAHULUAN**

Pemerintah terus berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan di Indonesia, tercatat angka kemiskinan di Indonesia pada Maret 2020 (Susenas 2020) ada sekitar 26,42 Juta jiwa masyarakat Indonesia di kategorikan miskin meningkat 1,63 juta jiwa september 2019 dan meningkat 1,28 juta jiwa terhadap maret 2019. Dalam upaya tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah meluncurkan sebuah program guna mengentaskan kemiskinan, program itu di beri nama program BEKERJA (Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera). Program ini menjangkau 1.000 Desa di 100 Kabupaten dan 10 provinsi. (BALITBANG/KEMENTAN 2018).

Program BEKERJA ini merupakan program Padat Karya Tunai yang berbasis

Pertanian. Program ini diharapkan dapat menjadi solusi permanen dalam rangka mengentaskan Kemiskinan di Indonesia.

Program BEKERJA yang di gagas oleh Kementerian Pertanian pada tahun 2018 ini sudah memasuki tahun ke dua, pada tahun 2018, jumlah target dalam program BEKERJA ini adalah 10 Provinsi, 776 Desa dan 200.000 Rumah Tangga Miskin (RTM) sedangkan tahun 2019 adalah 23 Provinsi, mencakup 153 Kabupaten, 386 Kecamatan dan 4.086 Desa dengan target penerima bantuan sebanyak 329.127 RTMP dan 744 KRPL. Di Kabupaten Sukabumi, hanya 4 Kecamatan yang melaksanakan program BEKERJA ini, yaitu Kecamatan Jampangtengah, Kecamatan Cikembar, Kecamatan Lengkung dan Kecamatan Pabuaran, namun dari ke – 4

kecamatan tersebut, hanya kecamatan cikembar saja yang dapat melaksanakan program tersebut di karenakan proses penyaluran bantuan yang tidak memungkinkan dikarenakan terkendala Pandemi Covid -19.

Dengan adanya bantuan dari program BEKERJA ini membuat masyarakat menjadi senang, khususnya yang menjadi penerima bantuan, karena mereka berharap dengan adanya bantuan ini bisa meningkatkan taraf hidup mereka. Namun ternyata dalam pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan yang mengakibatkan kurang efektif nya program tersebut, sehingga tujuan awal tidak tercapai dengan baik, yaitu sebagai berikut

Bantuan Tidak Efektif  
 Tujuan awal dari program BEKERJA ini yaitu untuk mengentaskan kemiskinan dan menambah pendapatan Rumah Tangga Miskin (PERMENTAN NO.14/2019).

Namun kenyataannya, di Kecamatan Cikembar yang menjadi tempat pelaksanaan program BEKERJA ini di Kabupaten Sukabumi, kemiskinan tidak mengalami penurunan, tercatat malah terjadi kenaikan jumlah angka kemiskinan, berikut datanya:

**Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi 2019-2020**

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi (2019-2020)
	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)
2019	6.011
2020	6.046

Sumber: UPTD DALDUK Kecamatan Cikembar Tahun 2020.

Berdasarkan data di atas, terdapat kenaikan jumlah kemiskinan yang terjadi di Kecamatan Cikembar, tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 35 Jiwa dari tahun 2020, yang artinya program BEKERJA ini belum sepenuhnya membantu mengurangi jumlah kemiskinan yang ada di Kecamatan Cikembar. Salah satu indikator tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah adalah tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang

merupakan nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang di hasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode (Hadi Sasana, 2006). Semakin tinggi PDRB suatu daerah, maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut. Berikut pendapatan RTM Program BEKERJA di Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2020.

**Tabel 1.2 Pendapatan Rumah Tangga Miskin Program BEKERJA (Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera) Di Kecamatan Cikembar Tahun 2019-2020**

Tahun	RTM Memenuhi Syarat	Pendapatan RTM (Bulan)	Rata - Rata (Rupiah/Hari)
2019	1.217	425.000	Rp.14.166
2020	1.217	415.000	Rp.13.833

Sumber: UPTD DALDUK Kecamatan Cikembar Tahun 2020.

Pendapatan RTM penerima bantuan program BEKERJA apabila kita lihat dari tabel 1.2, tahun 2019 pendapatan RTM sebesar Rp. 425.000/bulan mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar Rp. 10.000 yaitu berada di angka Rp. 415.000/bulan, padahal Asumsi kelayakan finansial usaha ayam kampung KUB yang diberikan kepada RTM berupa DOC untuk pendapatannya sebesar Rp 2,2 juta per bulan, yang disebut miskin pendapatan Rp. 1.400.000 (Kementerian Pertanian 2018). Artinya, dengan pendapatan Rp. 1.400.000 ditambah Rp.2.200.000 pemasukan tambahan, RTM dapat menghasilkan Rp3.600.000/bulan. Lepas dari kemiskinan 6 (enam) bulan kemudian. (Rusdiana, S., & Sartika, T. 2020). RTM diperkirakan sudah mampu memperoleh pendapatan sekitar Rp.2.300.000/RTM/4 bulan atau Rp.550.000/RTM/bulan (Sulaeman Amran 2018). Besaran ini jauh dari batas garis kemiskinan yang sekitar Rp 425.250/RTM/bulan (BPS 2019).

## 2. Tidak Tepat Sasaran

Dalam pelaksanaan program BEKERJA, terdapat bantuan yang tidak tepat sasaran dikarenakan dalam proses pencatatan data RTM (Rumah Tangga Miskin) pemerintah dalam hal ini BALITBANGNAK tidak melibatkan pihak terdekat seperti Kepala Desa ataupun Camat dalam pencatatan dan verifikasi

data penerima bantuan (Pendamping BEKERJA), selain itu juga ketidaktepatan ini terjadi karena banyak penerima bantuan tidak memiliki kemampuan untuk mengelola ternak namun mendapatkan bantuan, hal ini mengakibatkan terjadinya salah pemahaman yang seharusnya bantuan ternak itu di pelihara dan dikembangkan namun kenyataannya malah di perjual belikan.

Berikut adalah data jumlah RTM (Rumah Tangga Miskin) yang memenuhi syarat menerima bantuan dan tidak memenuhi syarat menerima bantuan.

**Tabel 1.3 Hasil Verifikasi Rincian Penerima Bantuan Program BEKERJA di Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat Tahun 2019**

Kabupaten Sukabumi	Kecamatan	Jumlah RTM	RTM Tidak Memenuhi Syarat	RTM Memenuhi Syarat
	Cikembar	1.450	233	1.217
	Jampang Tengah	4.313	270	4.043
	Lengkong	2.734	204	2.530
	Pabuaran	3.839	264	3.575
	<b>Jumlah</b>	<b>12.336</b>	<b>971</b>	<b>11.365</b>

Sumber: Dinas Peternakan Kabupaten Sukabumi, 2019

Apabila kita lihat dari tabel diatas, terdapat jumlah RTM yang tidak memenuhisyarat dalam menerima bantuan tersebut, ini dikarenakan dari proses verifikasi data awal ke pelaksanaan penyaluran bantuan itu berjarak 3 bulan, sehingga memungkinkan adanya perubahan dari segi pendapatan ekonomi di masyarakat danjuga terdapat beberapa RTM yang sebelumnya sudah mendapatkan bantuan serupa, sehingga tidak layak lagi mendapatkan bantuan tersebut.

#### 1. Pemerintah Kurang Teliti Dalam Menyalurkan Bantuan.

Dalam proses penyaluran bantuan, pendamping desa yang mewakili RTM mengeluhkan tentang bantuan 50 ekor ayam (Dispet Kab.Sukabumi) yang diberikan oleh pemerintah, bukan tentang jumlah tapi tentang bagaimana selisih antara ayam jantan dan betina, pendamping merasa bahwa pemerintah kurang memperhatikan hal yang nantinya akan berdampak kepada proses pelaksanaan dari program BEKERJA ini. Pendamping menemukan bahwa pemerintah kurang teliti dalam menyortir bantuan ini, pendamping dibuat bingung dengan jumlah ayam jantan lebih banyak daripada betina

sehingga membingungkan mereka dengan masa panen yang begitu lama yaitu 6 bulan namun selisih ayam antara jantan dan betina ini tidak sebanding malah lebih banyak jantan yang mengakibatkan nantinya tidak akan menghasilkan telur lebih banyak.

#### 2. Bantuan Ternak Diperjual Belikan Oleh RTM

Banyak terjadi dilapangan, RTM memperjual belikan bantuan ternak yang mereka dapatkan, ini dikarenakan RTM merasa tidak sanggup untuk mengelola bantuan dengan jangka waktu 6 bulan perawatan, mereka selalu mengeluh tentang pakan dari ayam itu sendiri, padahal seharusnya bantuan tersebut di budidayakan sesuai dengan potensi produksinya (PERMENTAN,2019), pemerintah hanya memberikan bantuan pakan 2x dengan jumlah 2 Quintal dalam 6 bulan per RTM (Kementan, 2018) ini tidak sebanding dengan kebutuhan 50 ekor ayam dan dalam jangka waktu 6 bulan.

Berdasarkan data dan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui pelaksanaan program BEKERJA (Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera), dan apa saja faktor pendukung dan pengambat pelaksanaan Program BEKERJA ini.

Dengan demikian judul yang diangkat adalah “Evaluasi Program BEKERJA (Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera) di Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi Tahun 2019.

## LANDASAN TEORI

### 1. Kebijakan Publik

Menurut Jones (Winarno, 2012:19) yang berjudul Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus) istilah “kebijakan (*policy term*) digunakan dalam praktek sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan, program, keputusan, standard, proposal dan *grand design*.” Namun demikian, meskipun kebijakan publik mungkin kelihatannya sedikit abstrak atau mungkin dapat dipandang sebagai sesuatu yang terjadi terhadap seseorang. Namun sebenarnya sebagaimana beberapa contoh yang

telah dipaparkan diatas, pada dasarnya kita telah dipengaruhi secara mendalam oleh banyak kebijakan publik dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Dunn (2000:132) Kebijakan Publik (*public policy*) merupakan: pola ketergantungan yang kompleks, yang saling berhubungan untuk bertindak dalam membuat keputusan yang dibuat oleh instansi pemerintahan.”

## 2. Evaluasi Kebijakan.

Menurut William, N. Dunn (1999) dalam Nugroho (2014), istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pembagian angka (*rating*), dan penilaian (*assesment*). Evaluasi berkenaan dengan menghasilkan informasi yang valid dan manfaat hasil kebijakan.

Evaluasi dapat memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa valid kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah mampu diraih melalui tindakan dari kebijakan publik; memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan target; memberikan sumbangan pada aplikasi metodemetode analisis kebijakan lainnya, termasuk juga perumusan masalah dan rekomendasi. Meskipun berkenaan dengan keseluruhan proses kebijakan, evaluasi lebih berkenaan dengan kinerja dari kebijakan, khususnya pada implementasi kebijakan (Nugroho, 2014). Dunn menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan publik dengan tabel berikut:

1. Efektifitas berkaitan dengan capaian hasil dari suatu kebijakan atau program yang diharapkan sudah sesuai dengan tujuan atau belum.
2. Efisiensi berkaitan dengan usaha yang telah dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan melalui unit biaya.
3. Kecukupan berkaitan dengan seberapa jauh tingkat efektivitas dan efisiensi dapat memuaskan kebutuhan dan tujuan sehingga

dapat memecahkan masalah.

4. Perataan berkaitan dengan sejauh mana kebijakan tersebut didistribusikan secara merata kepada objek kebijakan atau program.
5. Responsivitas berkaitan dengan seberapa jauh kebijakan tersebut dapat memenuhi kebutuhan objek kebijakan tersebut.
6. Ketepatan yang merujuk pada hasil atau tujuan program yang ada dapat berguna bagi masyarakat yang bersangkutan secara adil.

## 3. Program BEKERJA (Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera)

Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian yang selanjutnya di sebut Program BEKERJA adalah upaya peningkatan produksi komoditas pertanian untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan melalui kegiatan pertanian dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat miskin. (PERMENTAN.2019)

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna (Nurdin dan Hartanti 2019). Pendapat lain dijelaskan oleh Moelong (2010) bahwa penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh objek penelitian, misalnya pada perilaku; persepsi; motivasi; tindakan; dan lain-lain yang dijabarkan secara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Dalam menentukan informan, peneliti menggunakan Teknik *Purposive Sampling*. Teknikpurposive sangat cocok untuk menentukan sampel yang memiliki kualitas informasi dan kredibilitas sehingga informasi yang didapatkan sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk menguji validitas data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik triangulasi, yaitu triangulasi sumber



data, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. (Sugiyono 2017:273). Kemudian analisis data menggunakan Teknik analisis data menurut Miles and Huberman dalam Sugiyono (2008: 237), mengemukakan aktivitas dalam analisis data kualitatif harus dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Dan terdapat empat alur kegiatan dalam aktivitas dalam analisis data, yaitu pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi(*conclutions*).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Peternakan Kabupaten Sukabumi dengan menggunakan teori evaluasi dari Wiliam N. Dunn yang terdiri dari enam indikator yaitu:

### **Efektivitas**

Pada indikator efektivitas menjelaskan bahwa pelaksanaan program BEKERJA (Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera) di Kecamatan Cikembar belum optimal, ini terlihat dari tujuan program BEKERJA untuk mengatasi kemiskinan dan menambah pendapatan RTM belum tercapai.

selain itu yaitu sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Sukabumi belum optimal, pendataan RTM masih menggunakan data lama dan jumlah pakan yang tidak mencukupi selama program BEKERJA ini berjalan.

### **Efisien**

Pada indikator efisiensi dapat menjelaskan bahwa usaha yang dilakukan untuk mencapai hasil yang di inginkan adalah dilihat dari 2 aspek yaitu sisi kemudahan dan ketepatan dalam pengaduan permasalahan dan dari segi waktu dan biaya apakah program BEKERJA efisien. Dalam sisi kemudahan dan ketepatan dalam pengaduan permasalahan belum maksimal dikarenakan jumlah petugas dilapangan yang kurang mencukupi, proses sosialisai yang hanya dilakukan satu kali ketika verifikasi data dan jumlah pendamping tidak sebanding

dengan jumlah RTM yang begitu banyak. Dari sisi biaya dan waktu, program BEKERJA belum berjalan secara optimal, waktu panen yang cukup lama dan jumlah bantuan pakan yang diberikan tidak mencukupi membuat Dinas Peternakan, Pendamping dan RTM merasa program BEKERJA belum berjalan secara optimal.

### **Kecukupan**

Pada indikator kecukupan dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan program BEKERJA di Kecamatan Cikembar sudah baik, dilihat dari sisi pemerintah ini merupakan salah satu upaya untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di Indonesia, terlebih program ini dilaksanakan di Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi yang dimaksudkan untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di Kecamatan Cikembar, namun memang pelaksanaanya yang belum optimal. Disisi lain masyarakat merasa senang dengan adanya bantuan dari program BEKERJA.

### **Responsivitas**

Pada indikator responsivitas dapat dijelaskan bahwa partisipasi dan tanggapan dari masyarakat terhadap pelaksanaan program BEKERJA ini sudah baik. Respon RTM menyambut baik dengan adanya program BEKERJA ini, mereka sangat antusias ketika mereka tahu akan mendapatkan bantuan ayam, RTM merasa sangat senang dan antusias ketika mereka tahu akan mendapatkan bantuan dari program BEKERJA, mereka datang dan hadir ketempat pendistribuasian bantuan program BEKERJA di Kecamatan Cikembar.

### **Ketepatan**

Pada indikator ketepatan dapat dijelaskan bahwa program BEKERJA ini menimbulkan dampak positif bagi RTM, mereka merasa senang dengan bantuan yang diberikan oleh pemerintah, dengan adanya program BEKERJA ini masyarakat merasa terbantu apalagi di masa pandemi, sehingga RTM mempunyai kegiatan untuk mengelola ternak dengan harapan ini bisa membantu

perekonomian mereka dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang.

### **Perataan**

Pada indikator perataan dapat dijelaskan bahwa pendistribusian bantuan dari program BEKERJA ini diberikan secara merata ke setiap RTM yang berjumlah 50 ekor ayam per RTM.

### **Faktor Pendukung dan Penghambat**

#### **Faktor Pendukung**

Dari 6 kriteria keberhasilan evaluasi kebijakan menurut Dunn, peneliti melihat faktor pendukung dalam pelaksanaan program BEKERJA adalah :

- 1) Adanya pedoman pelaksanaan program BEKERJA (Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera).
- 2) Antusiasme masyarakat yang begitu senang ketika mendapatkan bantuan program BEKERJA.

#### **Faktor Penghambat**

- 1) Sosialisasi tentang program BEKERJA yang dilakukan oleh pihak Dinas Peternakan Kabupaten Sukabumi dirasa masih kurang optimal
- 2) Jumlah pendamping tidak sebanding dengan jumlah RTM yang begitu banyak, sehingga pengawasan terhadap RTM kurang begitu maksimal
- 3) Jumlah pakan yang diberikan pada RTM dirasa tidak mencukupi sampai ke masa panen sehingga RTM tidak mampu menghasilkan pendapatan dari bantuan program BEKERJA ini yang akhirnya tujuan dari program BEKERJA tidak berjalan sesuai apa yang diharapkan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan peneliti mengenai evaluasi program BEKERJA (Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera) di Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi secara umum belum maksimal, di mana semua dimensi belum berjalan dengan optimal.

Kriteria efektivitas, dalam pelaksanaan program BEKERJA di Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi secara umum dapat dikatakan belum maksimal, ini dikarenakan belum tercapainya tujuan dari program BEKERJA yaitu untuk mengurangi jumlah kemiskinan dan juga menambah pendapatan RTM.

Kriteria efisiensi, dalam pelaksanaan program bekerja di Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi yang dilaksanakan di Kecamatan Cikembar secara umum dikatakan belum efisien dilihat dari segi waktu dan biaya program BEKERJA ini belum memenuhi 2 kriteria tersebut dikarenakan program BEKERJA ini targetnya cukup lama yaitu 6 bulan untuk menghasilkan pendapatan bagi rtm dan juga pakan yang diberikan oleh pemerintah tidak mencukupi sehingga masyarakat harus mengeluarkan uang kembali untuk membeli pakan sehingga dapat menutupi kekurangan pakan untuk sampai ke masa panen.

Kriteria kecukupan, dalam pelaksanaan program BEKERJA di Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi secara umum dapat dikatakan baik, dikarenakan masyarakat merasa terbantu dengan adanya program bantuan BEKERJA ini, namun memang banyak sekali kendala yang terjadi di lapangan sehingga tujuan dari program BEKERJA ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan

Kriteria responsivitas, peneliti menyimpulkan bahwa responsivitas aparatur Dinas Peternakan Kabupaten Sukabumi maupun pihak terkait dalam merespon setiap kritik, saran, ataupun keluhan RTM mengenai pelaksanaan di lapangan dari bantuan program BEKERJA ini memang belum maksimal. Hal ini dikarenakan terbatasnya sumber daya yang dimiliki baik itu jumlah pendamping yang tidak sebanding dengan jumlah RTM maupun sumberdaya yang ada di Dinas Peternakan itu sendiri.

Kriteria Ketepatan, peneliti menyimpulkan bahwa ketepatan pelaksanaan program BEKERJA yang diselenggarakan di Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi maupun instansi terkait dapat dikatakan sudah dalam kategori baik, masyarakat merasa terbantu dengan adanya bantuan dari program BEKERJA ini dengan harapan bisa membantu perekonomian mereka sekalipun memang program BEKERJA ini belum mampu untuk menurunkan angka kemiskinan dan juga menambah pendapatan bagi RTM.

Kriteria perataan, pendistribusian bantuan program BEKERJA di Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi dan Dinas Peternakan Kabupaten Sukabumi dikatakan sudah cukup baik, ini terlihat dari jumlah bantuan yang diberikan secara merata ke setiap RTM

#### Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti, saran yang bisa diberikan mengenai program BEKERJA yang dilaksanakan di Kecamatan Cikembar agar program BEKERJA dapat terlaksana dengan baik yaitu :

- 1) Proses pendataan penerima bantuan agar diperbaharui dari tahun ke tahun sehingga Bantuan tersebut benar-benar menysasar kepada masyarakat yang memang membutuhkan dan meminimalisir tidak sasaran dari bantuan program bekerja ini.
- 2) Pengawasan dan sosialisasi mengenai program BEKERJA ini baik dari para pendamping maupun pemerintah dilakukan secara berkala sehingga masyarakat terkontrol dalam mengelola bantuan dari program BEKERJA.
- 3) Pemerintah harus juga memperhatikan jumlah pakan yang diberikan kepada RTM Sehingga kebutuhan pakan untuk sampai ke masa panen itu benar-benar mencukupi RTM untuk memaksimalkan bantuan dari program BEKERJA ini.
- 4) Jumlah pendamping di lapangan ditambah, sehingga proses pengawasan juga dapat

terkontrol dengan baik dan setiap keluhan, saran dan kritik dari RTM bisa langsung direspon oleh para pendamping sehingga dapat meminimalisir kesalahan RTM

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdul Wahab, Solichin. (2015). Analisis dan Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT Bumi Aksara
- [2] Agustino, Leo. 2008. Dasar – Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- [3] Creswell, Jhon W. 2016. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [4] Dunn, N. Wiliam, (2000). Analisis Kebijakan Publik. Edisi Kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- [5] Fowler, F.J. 2009. Survey Research Methods (Applied Social Research Methods). Fourth Edition. SAGE Publications Inc., Chapters 1-5.
- [6] Hardani et al. (2020). Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. CV. Pustaka Ilmu :Yogyakarta.
- [7] Moleong LJ. 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- [8] Riant Nugroho. 2014. Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- [9] Nugroho, Riant. 2011. Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- [10] Nurdin I. Hartati S. 2019. Metodologi Penelitian Sosial. Surabaya: Media SahabatCendekia.
- [11] Raco RJ. 2010. Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya. Jakarta: Grasindo.
- [12] Sasana, Hadi. 2006. Analisis dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap PertumbuhanEkonomi di kabupaten/Kota

- Provinsi Jawa Tengah. *Dinamika Pembangunan* Vol. 3 No. 2/ Desember 2006 :145-170.
- [13] Siyoto S. Sodik A. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi MediaPublishing.
- [14] Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung Alfabeta, CV.
- [15] Suharno. (2013). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Ombak.
- [16] Winarno, Budi (2012). *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS
- [17] **E-Book**
- [18] Dinas Peternakan Kabupaten Sukabumi Tahun 2019. *Hasil Verifikasi Rincian Penerima Bantuan Program BEKERJA di Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat Tahun 2019*.
- [19] Kadji, Yulianto. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo Press.
- [20] UPTD DALDUK Kecamatan Cikembar 2020. *Jumlah Penduduk Miskin Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2020*.
- [21] UPTD DALDUK Kecamatan Cikembar 2020. *Pendapatan Rumah Tangga Miskin (RTM) Program BEKERJA (Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera) Di Kecamatan Cikembar Tahun 2019 – 2020*.
- [22] **Jurnal**
- [23] Rusdiana, S., & Sartika, T. (2020). *Peningkatan Nilai Ekonomi Pada RTM (RumahTangga Miskin) Melalui Program Bekerja Kementerian Pertanian*. SOCA:
- [24] *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 14(1), 146–157.
- [25] **Aturan Undang - Undang**
- [26] Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 442/Kpts/OT.050/6/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 316/Kpts/OT.050/5/2018 Tentang Pembentukan TIM Pelaksana Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (BEKERJA) Kementerian Pertanian. [2] Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 163/Huk/2017 Tentang Penetapan Perubahan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin Tahun 2017.
- [27] Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan
- [28] Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pedoman Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian Tahun Anggaran 2019